

EFEKTIVITAS PELAYANAN FUNGSI TEKNIS TERPADU LALU LINTAS PADA BIDANG PENEGAKKAN HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI DI TINGKAT SATLANTAS POLRES KABUPATEN GUNUNG MAS

Satrya Panalu Randen¹⁾, Eny Haryati²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: satryapanalu@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan era disrupsi membawa pengaruh gelombang volatilitas, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang telah dan akan terus mengubah cara hidup dan bekerja seseorang.” “Perubahan tersebut juga dirasakan oleh organisasi Polri yang dituntut untuk merespons perubahan.” “Oleh karena itu, keamanan sistem dan pelatihan tentang praktik keamanan siber yang baik perlu menjadi prioritas bagi anggota Polri; ketidaksesuaian dengan budaya, yang mana keberadaan aplikasi atau sistem yang dibuat di luar negeri atau di luar lingkungan Polri dapat tidak sesuai dengan budaya lokal, dan hal ini dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi atau sistem di kalangan anggota Polri.” “Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang operasi lalu lintas, Efektivitas Pelayanan Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Polres Kabupaten Gunung mas dapat memberikan masukan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dalam penegakan hukum lalu lintas; Menyediakan layanan bantuan teknis kepada anggota Polri dalam penggunaan teknologi baru yang diperlukan dalam penegakan hukum lalu lintas.” “Teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: Teori Efektivitas dan Teori, Pelayanan.” “Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana permasalahan yang diangkat dan teori yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berkembang ketika peneliti berada di lapangan atau konteks sosial.” “Hasil Penelitian ini adalah bahwa Pertama, efektifitas pelayanan Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas di Tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakan hukum berbasis teknologi informasi masih belum sesuai dan diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi karena masih jauh dari apa yang diharapkan.” Efektivitas pelayanan Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas dalam meningkatkan kemampuan anggota lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakan hukum berbasis teknologi antara lain melakukan pelatihan, pemantauan dan pengawasan, pengembangan teknologi, dan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait.” “Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas dalam meningkatkan kemampuan anggota lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakan hukum berbasis teknologi berasal dari: Program Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas yang merupakan bagian dari penegak hukum yang menjalankan fungsi pelatihan, pengawasan, pengembangan teknologi, dan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait; kebijakan yang diterapkan dalam Program Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas; perilaku anggota yang tergabung dalam Program Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas; dan interaksi antara pelatih dan anggota yang mengikuti pelatihan, serta masyarakat

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan Teknis Terpadu, Kemampuan Anggota Lalu Lintas, Penegakan Hukum Berbasis Teknologi

ABSTRACT

The existence of the era of disruption brings the influence of waves of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, which have and will continue to change the way

people live and work. The change is also felt by the National Police organization which is required to respond to changes. Therefore, system security and training on good cybersecurity practices need to be a priority for members of the National Police; cultural incompatibility, where the existence of applications or systems made abroad or outside the Polri environment may be incompatible with local culture, and this may affect the acceptance and use of applications or systems among Polri members. With extensive experience and knowledge of traffic operations, the Effectiveness of the Integrated Traffic Technical Service of the Gunung Mas District Police Station can provide input on how technology can be used effectively in traffic law enforcement; Provide technical assistance services to members of the National Police in the use of new technologies required in traffic law enforcement. The theories used in this study are: Theory of Effectiveness and Theory Service. In this study, researchers use a qualitative approach, where the problems raised and the theories used are still temporary and will develop when researchers are in the field or social context. The result of this study is that First, the ability of Traffic Members at the Gunung Mas Police Station Level in the field of information technology-based law enforcement is still not appropriate and training is needed to improve technology-based law enforcement capabilities because it is still far from what was expected. Second, the role of the Satlantas Traffic Integrated Technical Function in improving the ability of traffic members at the Gunung Mas Police Station level in the field of technology-based law enforcement, including conducting training, monitoring and supervision, technology development, and collaborating with related parties. Third, Factors that affect the effectiveness of the Satlantas Traffic Integrated Technical service in improving the ability of traffic members at the Gunung Mas Police level in the field of technology-based law enforcement come from: Satlantas Traffic Integrated Technical Function Program which is part of law enforcement that carries out the functions of training, supervision, technology development, and collaboration with related parties; policies implemented in the Satlantas Traffic Integrated Technical Function Program; behavior of members who are members of the Satlantas Traffic Integrated Technical Function Program; and interactions between trainers and trainees, as well as the community.

Keywords: Effectiveness of Integrated Technical Services, Traffic Member Capability, Technology-Based Law Enforcement

A. LATAR BELAKANG

Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya tersebut ternyata memiliki banyak kelemahan, khususnya di bidang pelatihan yang dilakukan kepada anggota Polri untuk mengimplementasikan E-TLE Monitoring Backoffice. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain berasal dari: (1) keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk memberikan pelatihan yang cukup dan efektif kepada anggota Polri tentang penggunaan E-TLE Monitoring Backoffice, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas pelatihan dan membatasi jangkauan pelatihan yang dapat diberikan kepada anggota Polri; (2) kurangnya pengetahuan

teknis dan keahlian dalam menggunakan teknologi E-TLE Monitoring Backoffice, terutama bagi mereka yang sudah berusia tua atau yang belum terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, pelatihan yang efektif akan memerlukan waktu dan upaya untuk memastikan bahwa semua anggota Polri memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi tersebut; (3) keterbatasan dalam pengalaman penggunaan teknologi E-TLE Monitoring Backoffice pada berbagai situasi di lapangan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelatihan yang efektif, Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelatihan mencakup semua skenario dan situasi yang mungkin

dihadapi oleh anggota Polri dalam penegakan hukum lalu lintas; (4) Penggunaan E-TLE Monitoring Backoffice memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang baik untuk menjaga kualitas perangkat dan memastikan keandalan data yang diperoleh, oleh karena itu Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas perlu memastikan bahwa anggota Polri dilatih untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data yang akurat; (5) Meskipun E-TLE Monitoring Backoffice dapat mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum lalu lintas, penggunaan teknologi ini juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi. Jika terjadi kerusakan atau masalah teknis dengan perangkat E-TLE Monitoring Backoffice, maka anggota Polri mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan tugas mereka. Oleh karena itu, pelatihan yang tepat harus diberikan kepada anggota Polri untuk memastikan bahwa mereka dapat mengatasi masalah teknis tersebut.”

“Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, diketahui bahwa dalam menjawab tantangan perkembangan zaman yang direspon Polri melalui inovasi aplikasi penegakan hukum berbasis teknologi yang terwujud dalam penerapan E-TLE Monitoring Backoffice, hal ini masih memiliki kelemahan yang berasal dari keterbatasan kemampuan anggota fungsi Lalu Lintas Polri. Menanggapi persoalan tersebut, diperlukan peran Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas untuk meningkatkan kemampuan anggota Polri, khususnya yang bertugas di tingkat Polres Gunung Mas agar menjadi basis percontohan dari semua fungsi Lalu Lintas Polri. Namun, mengingat temuan hasil prapenelitian yang menunjukkan adanya beberapa kelemahan peran pada Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas tersebut, maka diperlukan pemecahan masalah yang tepat terkait peran yang diembannya tersebut.”

“Untuk menjelaskan beberapa upaya pemecahan masalah peran Fungsi Teknis

Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas dalam meningkatkan kemampuan implementasi aplikasi penegakan hukum berbasis teknologi anggota fungsi Lalu Lintas Polri, khususnya yang bertugas di tingkat Polres Gunung Mas.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Efektivitas

“Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000) dalam Ali Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:”

- a. Pendekatan eksperimental (experimental approach). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian

informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (pre-existing condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

- e. Pendekatan yang responsif ((the responsive approach). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan

adalah semata-matahasil atau tujuan yang dikehendaki.

2. Teori Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badanusaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan public yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.” “Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

- a. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
- b. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasiyang berkepentingan,
- c. Kepuasan yang diberikan dan/atauditerima oleh penerima layanan (pelanggan).

“Dengan demikian, Satlantas Polres Gunung Mas dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

C. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian peran Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas dalam meningkatkan kemampuan anggota lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakkan hukum berbasis teknologi adalah pendekatan kualitatif. Tujuan diterapkannya pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini adalah agar peneliti dapat memahami persoalan terkait peran Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Gunung Mas dalam meningkatkan kemampuan anggota lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakkan hukum berbasis teknologi, efektivitas pelatihan fungsi teknis terpadu lalu lintas dalam peningkatan kemampuan personil lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakkan hukum berbasis teknologi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan fungsi teknis terpadu lalu lintas dalam peningkatan kemampuan personil lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakkan hukum berbasis teknologi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dari hasil pengamatan peneliti, kerjasama antar instansi dalam meningkatkan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi tersebut kendala oleh adanya masalah perbedaan kepentingan dan tujuan antar instansi, karena setiap instansi memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing, sehingga bisa terjadi ketidakcocokan atau perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait penegakan hukum berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat menghambat koordinasi dan kerjasama antarinstansi yang efektif. Kendala selanjutnya juga muncul akibat beberapa instansi, terutama di daerah-daerah terpencil, mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan Satlantas polres Gunung Mas dalam penegakan hukum berbasis teknologi. Masalah lain juga datang dari adanya keterbatasan komunikasi dan koordinasi antarinstansi dapat menghambat aliran

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan duplikasi atau tumpang tindih dalam pekerjaan dan membuang-buang sumber daya. Masalah selanjutnya juga dapat berasal dari adanya perbedaan kapasitas dan kemampuan antarinstansi dalam hal teknologi dan pengalaman dalam penegakan hukum berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama antarinstansi. Hal ini terjadi karena beberapa instansi mungkin lebih maju dalam hal teknologi dan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan dalam meningkatkan kemampuan mereka. Kendala selanjutnya juga dapat berasal dari masalah ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan antarinstansi yang mampu menghambat kerjasama antarinstansi dalam penegakan hukum berbasis teknologi, karena setiap instansi beroperasi di bawah regulasi yang berbeda-beda, sehingga hal ini dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas bersama.

Program Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas merupakan program kerja gabungan antara Subditdakgar Satlantas polres Gunung Mas dan Bagian Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan, yang menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Dalam menjalankan tugasnya, Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Program ini juga menjalankan tugas pelatihan pada bidang penegakan hukum berbasis teknologi. Salah satu tugas penting dari Satlantas polres Gunung Mas adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas personel dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum lalu lintas.

Beberapa program pelatihan yang dilakukan oleh Satlantas polres Gunung Mas dalam bidang penegakan hukum berbasis

teknologi antara lain pelatihan mengenai aplikasi teknologi informasi untuk pemantauan lalu lintas dan deteksi pelanggaran, pelatihan mengenai analisis data lalu lintas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan pelatihan mengenai teknik investigasi digital untuk mendukung penanganan kejahatan lalu lintas.

Selain itu, Satlantas polres Gunung Mas juga mengadakan kerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan personel dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan guna mendukung penegakan hukum lalu lintas yang semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Program Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi. Beberapa peran tersebut antara lain:

1. Menggunakan teknologi canggih dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas
Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas menggunakan teknologi canggih seperti CCTV, ANPR, E-TLE dan E-TLE Monitoring Backoffice dan perangkat lunak keamanan jalan raya untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara cepat dan akurat.
2. Meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum
Dengan menggunakan teknologi, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat aliran lalu lintas di jalan raya.
3. Meningkatkan keamanan jalan raya
Dengan penggunaan teknologi canggih, Fungsi Teknis Terpadu

Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas dapat memantau kondisi jalan raya secara real-time, sehingga dapat mencegah kecelakaan dan tindakan kriminal yang terjadi di jalan.

4. Meningkatkan kualitas data
Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas juga dapat mengumpulkan dan menganalisis data lalu lintas secara akurat. Data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku pengemudi dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan.
5. Meningkatkan kepatuhan hukum
Dengan adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang canggih, masyarakat akan lebih mematuhi aturan lalu lintas karena merasa terawasi dan terlindungi.

Program Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas juga menjalankan tugas pelatihan pada bidang penegakan hukum berbasis teknologi. Salah satu tugas penting dari Satlantas polres Gunung Mas adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas personel dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum lalu lintas. Beberapa program pelatihan yang dilakukan oleh Satlantas polres Gunung Mas dalam bidang penegakan hukum berbasis teknologi antara lain pelatihan mengenai aplikasi teknologi informasi seperti E-TLE Monitoring Backoffice untuk pemantauan lalu lintas dan deteksi pelanggaran, pelatihan mengenai analisis data lalu lintas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan pelatihan mengenai teknik

investigasi digital untuk mendukung penanganan kejahatan lalu lintas. Selain itu, Satlantas polres Gunung Mas juga mengadakan kerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan personel dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan guna mendukung penegakan hukum lalu lintas yang semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat.

2. Pembahasan

Kerjasama antar instansi dalam meningkatkan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi tersebut kendala oleh adanya masalah perbedaan kepentingan dan tujuan antar instansi, karena setiap instansi memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing, sehingga bisa terjadi ketidakcocokan atau perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait penegakan hukum berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat menghambat koordinasi dan kerjasama antarinstansi yang efektif. Kendala selanjutnya juga muncul akibat beberapa instansi, terutama di daerah-daerah terpencil, mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan Satlantas polres Gunung Mas dalam penegakan hukum berbasis teknologi. Masalah lain juga datang dari adanya keterbatasan komunikasi dan koordinasi antarinstansi dapat menghambat aliran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan duplikasi atau tumpang tindih dalam pekerjaan dan membuang-buang sumber daya. Masalah selanjutnya juga dapat

berasal dari adanya perbedaan kapasitas dan kemampuan antarinstansi dalam hal teknologi dan pengalaman dalam penegakan hukum berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama antarinstansi. Hal ini terjadi karena beberapa instansi mungkin lebih maju dalam hal teknologi dan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan dalam meningkatkan kemampuan mereka. Kendala selanjutnya juga dapat berasal dari masalah ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan antarinstansi yang mampu menghambat kerjasama antarinstansi dalam penegakan hukum berbasis teknologi, karena setiap instansi beroperasi di bawah regulasi yang berbeda-beda, sehingga hal ini dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas bersama. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, penting untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antarinstansi dengan memperhatikan kendala dan kelemahan, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki komunikasi, membangun kepercayaan, menyelaraskan tujuan dan kepentingan, serta menyederhanakan regulasi dan kebijakan yang terkait. Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan Anggota Lalu Lintas di tingkat Satlantas polres Gunung Mas pada Bidang Penegakkan Hukum Berbasis Teknologi. Keberadaan peran Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas polres Gunung Mas tersebut jika dianalisis dengan teori peran dapat digunakan untuk menjelaskan peran yang dapat digunakan untuk memahami tugas,

harapan, dan perilaku yang diharapkan dari Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Polres Gunung Mas secara lebih komprehensif dan mendalam.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori pelayanan Satlantas Polres Gunung Mas dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Efektifitas pelayanan Fungsi Teknis Terpadu Lalu Lintas Satlantas Polres Gunung Mas dalam meningkatkan kemampuan anggota lalu lintas di tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakkan hukum berbasis teknologi antara lain melakukan pelatihan, pemantauan dan pengawasan, pengembangan teknologi, dan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Kemampuan Anggota Lalu Lintas di Tingkat Polres Gunung Mas pada bidang penegakan hukum berbasis teknologi informasi masih belum sesuai dan diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi karena masih jauh dari apa yang diharapkan.

Saran

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data kepolisian, sehingga

informasi dapat terintegrasi dengan baik dan lebih cepat untuk diakses. Menyediakan sumber daya dan anggaran yang cukup untuk pengembangan teknologi, sehingga Satlantas Polres Gunung Mas dapat terus mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Mengembangkan sistem keamanan yang kuat dan memastikan privasi data terjaga dengan baik, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memperoleh akses ke data dan teknologi yang dapat mendukung penegakan hukum. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan penegakan hukum berbasis teknologi.

REFERENSI

- Ali Mohammad Saghiri, dkk. 2022. A Survey of Artificial Intelligence Challenges: Analyzing the Definitions, Relationships, and Evolutions. *Appl. Sci.* 2022, 12, 4054.
- Burke, W. W. 2014. The rise and fall of the growth of organization development: What now? *Consulting Psychology Journal: Practice and Research* 70 (3)
- Daisy Mui Hung Kee dan Mohammad Rabiul Basher Rubel. 2021. Technology Adaptation Is on Its Way: The Role of High Involvement Work Practice. *Int. J. Business Innovation and Research*, Vol. 25, No. 1, 2021.
- Hardy M, Harvey H. 2020. Artificial Intelligence in Diagnostic Imaging: Impact on The Radiography Profession. *Br J Radiol* 2020; 93: 20190840.
- Ilman Ataunur dan Eny Ariyanto. 2015. Pengaruh Kompetensi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pt Adaro Energy Tbk. *Telaah bisnis*, Vol. 16, no. 2.

- Phimchanok Khamchai, Khwanying Sriprasertpap, and Rittichai On-ming. 2022. Adaptive Training System Model to Improve the Information and Communication Technology Skills of Personnel, Thailand. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 3, March 2022.
- Suwandi. 2022. Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Wasaka Hukum* Vol. 10 No. 1

